



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PEMBERIAN GANTI
RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS: KORBAN “SALAH GUSUR” PADA
KONFLIK PERTANAHAN DI DAERAH BEKASI)**

SKRIPSI

GIAN MUZAKIR HAYAT

2210611459

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2026**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL:
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PEMBERIAN GANTI RUGI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS: KORBAN "SALAH GUSUR" PADA KONFLIK
PERTANAHAN DI DAERAH BEKASI)**

**GIAN MUZAKIR HAYAT
2210611459**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jakarta, 30 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK. 217121295

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri,
S.H., M.H.

NIP. 196005021986031003



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Gian Muzakir Hayat

NIM : 2210611459

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Negara Pemberian Ganti Rugi Dalam
Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus: Korban "Salah Gusur"
Pada Konflik Pertanahan Di Daerah Bekasi)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Wardani Rizkianti,
S.H., M.Kn.

Dr. Iwan Erar Joesoef,
S.H., Sp.N., M.Kn

Prof. Dr. Taufiqurrohman
Syahuri, S.H., M.H.,



Dr. Suherman, S.H.,
LL.M.,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Muthia Sakti, S.H.,
M.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 5 Juni 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Gian Muzakir Hayat

NIM : 2210611459

Tanggal : 30 Januari 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Gian Muzakir Hayat
NIM : 2210611459
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Negara Pemberian Ganti Rugi
Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus: Korban
"Salah Gusur" Pada Konflik Pertanahan Di Daerah Bekasi
Dalam Perspektif Hukum Perdata)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 20 Desember 2025

Yang menyatakan,




Gian Muzakir Hayat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Pertanggungjawaban Negara Pemberian Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus: Korban “Salah Gusur” Pada Konflik Pertanahan Di Daerah Bekasi).”* Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn., selaku Ketua Dosen Penguji, dan Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn., selaku Dosen Penguji.
4. Alm. Aris Kurnia dan Sukamti, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta bimbingan yang telah diberikan dalam membesarkan penulis hingga mampu terus berjuang menggapai mimpi dan cita-cita. Segala pencapaian dan keberhasilan yang diraih di masa mendatang akan selalu menjadi berkat dari kalian berdua, sekaligus penulis persembahkan untuk kalian.
5. Aqifa Naila, adik yang senantiasa menghadirkan keceriaan dan semangat dalam kehidupan penulis. Keriangan dan tawa yang selalu terpancar darinya menjadi sumber kekuatan sekaligus pengingat bagi penulis bahwa setiap perjuangan tidak hanya diwarnai dengan kerja keras, tetapi juga perlu dijalani dengan hati yang gembira. Kehadirannya memberikan dorongan

tersendiri sehingga penulis mampu tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Rayhan Fasya Akbar, Ahmad Wildan, Kamilah Jasmine, Khalisyah Amara Podungge, Lucia Abrielle Dimitri, Mohamad Haikal Rahmadia, Theodore Daniel Sebastian, Jason Edwin Cristian Sihite dan Setyo Nugraha, yang senantiasa hadir mendampingi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas. Dukungan, kebersamaan, dan canda tawa mereka memberikan warna tersendiri sehingga penulis mampu menjalani perkuliahan dengan lebih ringan dan bermakna.
7. Rafa Prayoga Indrajaya, Emir Dzikran Musyaffa, dan Taris Zharfa Hirzi, sahabat kecil yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran mereka sejak masa kanak-kanak hingga kini memberikan banyak kenangan, dukungan, dan doa yang menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
8. Rika Afifah Azzahra, atas segala dukungan moral dan perhatian tulus yang diberikan selama masa studi hingga tahap penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatiannya telah menjadi sumber semangat yang berarti bagi penulis dalam melalui setiap proses yang dijalani.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi sumbangsih kecil bagi dunia akademik. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua.

Jakarta, 30 Januari 2026

Penulis,



Gian Muzakir Hayat

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban negara dalam pemberian ganti rugi bagi korban “salah gusur” pada konflik pertanahan di Bekasi dari perspektif hukum perdata. Studi berangkat dari eksekusi pengosongan di Kabupaten Bekasi yang memunculkan dugaan salah sasaran dan cacat prosedural, terutama terkait identifikasi objek, tumpang tindih data pertanahan, serta pengabaian sertifikat hak milik yang belum dibatalkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung telaah literatur, dokumen, dan wawancara untuk klarifikasi teknis-administratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggusuran keliru dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* dan memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan (*culpa*), kerugian materiil-immateriil, serta hubungan kausal. Implikasinya, negara sebagai subjek hukum wajib memberikan ganti rugi penuh dan pemulihan hak berdasarkan prinsip *restitutio in integrum* melalui perbaikan data, pengukuran ulang, pemulihan status hak, serta penyediaan hunian sementara yang layak. Penelitian merekomendasikan verifikasi berlapis pra-eksekusi, koordinasi wajib pengadilan-BPN, pedoman penilaian kerugian yang transparan, dan mekanisme pemulihan cepat guna mencegah keterlambatan serta menjamin ketidakberulangan. Selain litigasi perdata, korban perlu difasilitasi mengakses upaya administratif dan nonlitigasi, termasuk pengaduan maladministrasi, mediasi, perlawanan eksekusi, serta gugatan di peradilan tata usaha negara ketika sumber masalah berasal dari keputusan administrasi. Pemulihan sosial harus disertai dukungan psikososial dan pemulihan penghidupan.

Kata kunci: salah gusur; ganti rugi; Pasal 1365 KUHPerdata

ABSTRACT

This study examines state liability for compensation to victims of wrongful eviction (“salah gusur”) in a land dispute in Bekasi through an Indonesian private-law lens. The analysis is grounded in the forced vacating and demolition at Bekasi Regency, which raised allegations of mistaken target and procedural defects, including inaccurate object identification, overlapping land administration data, and disregard of land certificates that had not been lawfully cancelled. The research applies a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by document review and interviews to clarify technical and administrative issues. The findings indicate that a mistaken eviction may constitute onrechtmatige overheidsdaad and satisfy the elements of Article 1365 of the Civil Code: an unlawful act, fault (culpa), material and immaterial losses, and a causal nexus. Consequently, the state, acting through its organs, bears a duty to provide full damages and rights restoration under the principle of restitutio in integrum, including data correction, remeasurement, restoration of legal status, and provision of decent temporary housing. The study further recommends mandatory multi-layer pre-execution verification, institutional coordination between courts and the land office, transparent loss-assessment guidelines, and a rapid relief mechanism to prevent destitution and ensure non-repetition affected households and communities.

Keywords: wrongful eviction; state liability; restitution.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Analisis	9
3. Sumber Data	11
4. Cara Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	14
B. Tinjauan Teori	19
1. Teori Tanggung Jawab Negara	19
2. Teori dan Pengertian Perlindungan Hukum	22
3. Konflik dan Sengketa Pertanahan	23
4. Ganti Kerugian	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	28
A. Gambaran Peristiwa dan Pola Masalah Administrasi Pertanahan dalam “Salah Gusur” di Daerah Kabupaten Bekasi	28
B. Temuan Normatif tentang Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan Kerentanan Pembuktian Objek	29
C. Temuan Awal Dampak Akibat Hukum dan Sosial Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi	29
D. Matriks Pertanyaan Wawancara Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Relevansinya terhadap Analisis Pembahasan	30
1. Kewenangan BPN Kabupaten Bekasi dalam Penetapan, Pengukuran, dan Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah pada SHM 325	30

2. Status Hukum Tanah di Lokasi Sengketa Tanah Sebelum Terjadinya Penggusuran	31
3. Temuan Tumpang Tindih Data atau Permasalahan Administrasi Pertanahan di Lokasi Tersebut	31
4. Prosedur Pengukuran dan Verifikasi Objek Tanah sebelum Dinyatakan sebagai Objek Sengketa atau Verifikasi.....	32
5. Pelibatan atau Permintaan Pertimbangan Teknis BPN sebelum Eksekusi Dilakukan.....	32
6. Faktor Utama Penyebab Dugaan “Salah Gusur” di Lokasi Pertanahan	32
7. Kesalahan Administrasi Pertanahan Meskipun telah Terbit Sertifikat secara Formal	33
8. Tanggung Jawab Hukum Negara Apabila Terjadi Kesalahan Administrasi Pertanahan	33
9. Posisi BPN terhadap Tuntutan Ganti Rugi Korban Dugaan Salah Gusur	34
10. Pihak yang Tepat untuk Bertanggung Jawab Memberi Ganti Rugi....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Pemberian Ganti Rugi terhadap Korban “Salah Gusur” yang Menyebabkan Kerugian.....	36
1. Hierarki Hak atas Tanah.....	36
2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Kasus “Salah Gusur” di Bekasi.....	43
3. Implikasi Yuridis Pemenuhan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Kewajiban Ganti Rugi Negara	55
B. Tanggung Jawab Negara dalam Menanggulangi Akibat Hukum dan Sosial yang Dialami Korban “Salah Gusur”	69
1. Penanggulangan Akibat Hukum terhadap Korban “Salah Gusur”	70
2. Penanggulangan Akibat Sosial dan Kewajiban Pemulihan oleh Negara	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	90